

## Candi Sebagai Representasi Kekuasaan dan Studi Arsitektur Politik Masa Hindu-Buddha di Jawa

Ira Pramudawardhani<sup>a,1,\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, Indonesia

<sup>1</sup> irapramuda9@gmail.com

\* Corresponding Author; Ira Pramudawardhani



Received 30 November 2024; accepted 22 December 2024; published 30 December 2024

### ABSTRAK

*Candi-candi yang tersebar di wilayah Jawa pada masa Hindu-Buddha bukan hanya sekadar bangunan religius, melainkan juga sebagai simbol politik yang merepresentasikan kekuasaan raja dan legitimasi ideologi kerajaan. Arsitektur candi menjadi sebuah sarana ekspresi kekuasaan spiritual dan temporal yang saling terhubung. Artikel/ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana candi bisa juga digunakan sebagai Instrumen Representasi Kekuasaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, khususnya dalam Aspek Arsitektural dan tata letaknya Metode yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif Historis dengan Studi Pustaka dan Analisis Visual terhadap beberapa Candi besar seperti Borobudur, Prambanan, dan Penataran. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa arsitektur Candi menyiratkan Struktur Sosial-Politik, Ideologi Kerajaan, serta hubungan antara Raja, Dewa, dan Rakyat. Simbolisme Vertikal, Orientasi Kosmologis, Serta Relief-relief mitologis adalah bagian dari Strategi Visualisasi Kekuasaan. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa candi merupakan Manifestasi Politik sekaligus Religius dalam lanskap Budaya Jawa klasik.*

### KEYWORDS

Candi, kekuasaan, Arsitektur, Politik Masa Hindu Buddha.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### 1. Pendahuluan

Di Indonesia konsep kepemimpinan dalam hal ini juga mengenai politik menempatkan posisi rakyat menjadi bagian dari pemimpin politiknya, bagaimana pengaruh kebudayaan akan terus mengisi kekosongan kepemimpinan politik pada setiap masanya. Bagaimana pengaruh kebudayaan Hindu Buddha masih sangat nampak pada masa sesudahnya, dengan menempati bekas kerajaan Hindu Buddha secara tidak langsung juga memberikan pengaruh pada proses politik sesudahnya (Andriyanto, 2022). Sehingga arsitektur secara keseluruhan dan candi sebagai bagian dari peradaban Hindu Buddha juga mempunyai nilai-nilai yang ada di dalamnya.

Candi merupakan salah satu peninggalan paling mencolok dari masa Hindu-Buddha di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Selama berabad-abad, candi tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol visual dari kekuasaan raja dan negara. Di balik keagungan arsitekturnya, tersimpan narasi politik, ideologi, dan legitimasi kekuasaan yang diwujudkan dalam bentuk fisik dan simbolis (Supratikno Rahardjo, 2002).

Pada masa kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram Kuno, Kediri, Singhasari, dan Majapahit, pembangunan candi menjadi proyek kerajaan yang melibatkan kekuatan sumber daya besar. Candi bukan hanya tempat pemujaan dewa-dewi Hindu atau Buddha, tetapi juga tempat penghormatan terhadap raja yang dianggap sebagai titisan dewa (devaraja). Hal ini menjadikan candi sebagai representasi kekuasaan yang melekat secara spiritual dan politis (Soekmono, 1973).

Kajian tentang arsitektur politik menjadi penting untuk memahami bahwa ruang dan bentuk bangunan tidak pernah netral, melainkan selalu dikonstruksi untuk menegaskan otoritas dan ideologi tertentu. Dalam konteks Jawa klasik, arsitektur candi menjadi salah satu instrumen utama untuk menyampaikan pesan kekuasaan secara simbolik kepada masyarakat. Arsitektur politik menekankan bahwa bentuk, tata ruang, dan simbol-simbol visual dalam suatu bangunan dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi politik yang efektif.

Selain itu, perkembangan arsitektur candi di Jawa memperlihatkan adanya dialektika antara nilai-nilai religius dan kepentingan politik. Pembangunan candi seringkali dimaksudkan untuk melegitimasi posisi raja sebagai penguasa tertinggi sekaligus penghubung antara dunia manusia dan dunia dewa. Hal ini terlihat jelas dalam konsep mandala yang tercermin pada tata ruang candi, di mana pusat bangunan melambungkan dari gunung suci (Mahameru) sebagai tempat tinggal para dewa.

Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara sekitar abad ke-4 M membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Jawa, baik dari segi keagamaan, kebudayaan, maupun politik. Proses akulturasi antara tradisi lokal dengan ajaran Hindu-Buddha melahirkan bentuk kebudayaan baru, salah satunya adalah pembangunan candi sebagai pusat religius sekaligus politik.

Pada periode Mataram Kuno, misalnya, pembangunan Candi Prambanan dan Borobudur menunjukkan kemegahan arsitektur sekaligus kekuatan politik kerajaan. Pada masa Singhasari, pembangunan Candi Kidal dan Candi Jago memperlihatkan tradisi deifikasi raja, yakni pengultusan raja yang wafat menjadi dewa. Sementara pada masa Majapahit, candi-candi seperti Penataran digunakan sebagai legitimasi politik sekaligus manifestasi kejayaan kerajaan.

Studi mengenai candi selama ini lebih banyak menekankan aspek arsitektur, seni, dan keagamaan. Padahal, dimensi politik yang terkandung di dalamnya sangat signifikan untuk memahami relasi antara kekuasaan, agama, dan masyarakat Jawa klasik. Dengan demikian, kajian arsitektur politik terhadap candi dapat memberikan perspektif baru dalam memahami sejarah kekuasaan di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga relevan untuk menjelaskan bagaimana warisan budaya masa lalu dapat dijadikan sebagai media pendidikan politik dan budaya bagi generasi sekarang. Pemahaman terhadap simbolisme politik dalam candi juga membuka jalan bagi kajian interdisipliner antara sejarah, arkeologi, ilmu politik, dan kajian budaya.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan kajian pustaka (*library research*) serta studi lapangan (*field research*) pada beberapa situs candi di Jawa. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami makna simbolik dan representasi politik yang terkandung dalam arsitektur candi, bukan sekadar mengukur atau menghitung aspek fisiknya. Analisis dilakukan secara hermeneutik dan ikonografis, yaitu menafsirkan simbol-simbol arsitektural candi dan mengaitkannya dengan konteks politik, ideologi, serta struktur kekuasaan masa Jawa klasik. Analisis bersifat induktif, berangkat dari pengamatan empiris lalu disusun generalisasi tematis.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian menemukan bahwa arsitektur candi di Jawa bukan sekadar bangunan religius, tetapi juga instrumen politik yang dirancang untuk melegitimasi kekuasaan. Hasil penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Konsep Kosmologi dan Kekuasaan
  - a. Borobudur dan Prambanan dirancang berdasarkan konsep kosmologi Hindu-Buddha, menegaskan kedudukan raja sebagai pusat tatanan dunia (*axis mundi*).
  - b. Struktur bertingkat melambangkan hierarki sosial-politik, dengan raja di puncak sebagai representasi dewa
2. Deifikasi Raja (Raja-Dewa)
  - a. Pada masa Singhasari, raja yang wafat diperdewakan dan diabadikan dalam candi, seperti Anusapati di Candi Kidal dan Wisnuwardhana di Candi Jago.
  - b. Hal ini menunjukkan penggabungan antara fungsi religius dan politik.
3. Candi sebagai Simbol Negara
  - a. Candi Penataran berfungsi sebagai candi negara pada era Majapahit, menjadi pusat ritual legitimasi kerajaan sekaligus pernyataan simbolis tentang kejayaan politik Majapahit.
  - b. Relief-reliefnya menggambarkan narasi kepahlawanan dan legitimasi moral raja.
4. Arsitektur sebagai Media Propaganda
  - a. Tata ruang, ornamen, dan ikonografi candi tidak hanya religius, tetapi juga menyampaikan pesan tentang stabilitas, keadilan, dan otoritas kerajaan.
  - b. Candi menjadi media komunikasi non-verbal antara penguasa dan rakyat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur candi di Jawa pada masa Hindu-Buddha merupakan representasi dari politik simbolik. Arsitektur bukan sekadar fisik bangunan, melainkan sarana komunikasi ideologi. Hal ini sejalan dengan teori arsitektur politik yang menyatakan bahwa bentuk dan ruang dapat dimanfaatkan untuk mengukuhkan kekuasaan, Candi sebagai bangunan monumental memiliki fungsi ganda: spiritual dan politis. Di satu sisi, candi adalah pusat kegiatan religius yang menghubungkan manusia dengan dewa. Di sisi lain, candi adalah media legitimasi raja yang menyatakan kekuasaannya berasal dari kehendak ilahi.

Penggunaan simbol-simbol arsitektural seperti bentuk gunung, puncak berundak, dan tata letak mandala, menunjukkan bahwa konsep kekuasaan raja mengikuti struktur kosmologis. Raja diposisikan sebagai poros dunia (*axis mundi*), tempat bertemunya langit dan bumi. Munandar, A. A. (2001)

#### 3.1. Candi sebagai Manifestasi Ideologi Kekuasaan dan Representasi Politik Simbolik

Arsitektur candi tidak hanya menjadi karya seni religius, melainkan juga sarana komunikasi politik. Simbolisme kosmologis yang tercermin dalam struktur bertingkat, relief, dan orientasi bangunan dimanfaatkan untuk menegaskan legitimasi penguasa. Konsep *axis mundi* atau pusat dunia diterapkan pada Borobudur, di mana struktur bertingkat menuju puncak stupa utama

merepresentasikan perjalanan menuju pencerahan sekaligus hierarki sosial politik yang menempatkan raja di puncak sebagai “penghubung” antara dunia manusia dan dewa.

Candi Borobudur dan Prambanan menegaskan bahwa kerajaan Jawa klasik menggunakan simbol kosmologis untuk memperkuat wibawa. Borobudur dengan konsep mandala menggambarkan perjalanan spiritual sekaligus tatanan sosial politik yang hierarkis. Prambanan, dengan dominasi candi Siwa, memperlihatkan supremasi dinasti Sanjaya.

### 3.2. Borobudur dan Ideologi Buddhis

Borobudur, sebagai monumen Buddhis terbesar di dunia, tidak hanya merupakan tempat ritual, tetapi juga instrumen untuk menunjukkan kemegahan kerajaan Sailendra. Relief Lalitavistara menggambarkan kehidupan Buddha, namun juga menyiratkan pesan bahwa penguasa Sailendra adalah pelindung dharma. Dengan membangun monumen sebesar Borobudur, kerajaan mengklaim dirinya sebagai pusat spiritual Asia Tenggara. Ini menunjukkan bagaimana sebuah bangunan religius dapat menjadi instrumen diplomasi budaya dan politik internasional.

### 3.3. Prambanan dan Supremasi Hindu Sanjaya

Candi Prambanan didedikasikan untuk Trimurti, terutama Siwa, yang menunjukkan supremasi dinasti Sanjaya atas Sailendra. Dominasi Candi Siwa menegaskan bahwa raja Sanjaya adalah pelindung Siwaisme. Selain itu, relief Ramayana di Prambanan dapat dibaca sebagai metafora politik: Rama sebagai raja ideal yang menegakkan dharma menjadi model bagi penguasa Jawa. Dengan demikian, Prambanan bukan hanya bangunan keagamaan, tetapi juga pernyataan politik tentang siapa penguasa sah di Jawa pada abad ke-9.

### 3.4. Tradisi Deifikasi pada Dinasti Singhasari

Pada masa Singhasari, tradisi devaraja diwujudkan melalui pendirian candi untuk raja yang telah wafat. Candi Kidal memperingati Raja Anusapati dengan penggambaran Garuda sebagai simbol pembebasan jiwa, sedangkan Candi Jago menjadi tempat pemuliaan Wisnuwardhana. Melalui praktik ini, raja diposisikan sebagai makhluk transendental, bukan sekadar manusia. Mengenai deifikasi membuat rakyat tunduk secara spiritual, karena menolak raja berarti menentang kekuatan ilahi.

### 3.5. Majapahit dan Candi Penataran sebagai Candi Negara

Candi Penataran memperlihatkan peran candi sebagai representasi negara. Relief-relief Mahabharata di sana berfungsi sebagai legitimasi moral bagi raja, yang diibaratkan sebagai Pandawa: ksatria penegak kebenaran. Candi Penataran juga digunakan dalam upacara keagamaan negara, menandakan bahwa arsitektur candi merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Dengan demikian, kekuasaan Majapahit diproyeksikan melalui arsitektur sakral yang bisa diakses public.

### 3.6. Arsitektur sebagai Media Propaganda Kekuasaan

Bangunan monumental memiliki daya sugesti terhadap rakyat. Rakyat Jawa kuno, yang sebagian besar buta huruf, menerima pesan politik melalui simbol visual: bentuk candi, patung dewa, relief epik. Dengan kata lain, candi adalah media propaganda yang efektif. Sebagaimana monumen modern digunakan untuk menegaskan identitas nasional, candi pada masa lampau berfungsi sebagai “media massa” politik.

### 3.7. Relasi antara Agama dan Politik

Hindu-Buddha di Jawa tidak bisa dipisahkan dari politik. Agama menyediakan legitimasi teologis, sementara politik menyediakan sarana material untuk membangun candi. Hubungan simbiosis ini menjelaskan mengapa candi menjadi titik pertemuan antara kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Raja tidak hanya pelindung agama, tetapi juga dianggap sebagai titisan dewa, sehingga kewibawanya tak terbantahkan.

### 3.8. Candi sebagai Ruang Sosial

Selain fungsi religius dan politis, candi juga berfungsi sebagai ruang sosial. Ritual di candi melibatkan partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk persembahan maupun upacara kolektif. Dengan demikian, candi menjadi ruang di mana kekuasaan berinteraksi langsung dengan rakyat. Kehadiran rakyat dalam upacara di candi memperlihatkan penerimaan terhadap legitimasi politik raja.

### 3.9. Transformasi Makna Candi

Seiring waktu, makna candi mengalami transformasi. Pada masa kejayaan Hindu-Buddha, candi adalah simbol kekuasaan dan pusat spiritual. Namun setelah masuknya Islam, fungsi politis candi menurun, meski makna simboliknya tetap hidup sebagai warisan budaya. Hingga kini, candi masih menjadi simbol kebesaran Jawa kuno dan bahkan digunakan dalam wacana nasionalisme Indonesia, misalnya Borobudur yang dijadikan ikon pariwisata dunia.

### 3.10. Perbandingan dengan Monumen Politik Lain

Jika dibandingkan dengan monumen politik di dunia lain, fungsi candi di Jawa mirip dengan piramida Mesir, kuil Yunani, atau Katedral Eropa. Semua monumen itu menegaskan hubungan erat kaitannya antara agama dan kekuasaan. Dengan demikian, candi di Jawa tidak bisa dipandang sekadar sebagai tempat ibadah saja, akan tetapi harus juga ditempatkan dalam konteks global yaitu arsitektur politik.

### 3.11. Relevansi Bagi Kajian Sejarah Kontemporer

Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman kritis tentang bagaimana kekuasaan bekerja melalui simbol. Dalam konteks modern, negara juga membangun monumen untuk menegaskan legitimasi, seperti Monas di Jakarta. Dengan demikian, ada kesinambungan antara praktik politik masa lalu dengan masa kini.

### 3.12. Sintesis Teoretis

Menggunakan teori representasi simbolik (Geertz, 1980) dan teori arsitektur politik, dapat disimpulkan bahwa candi adalah teks politik yang bisa dibaca. Relief, tata ruang, dan ikonografi berfungsi seperti bahasa yang menyampaikan pesan kekuasaan.

## 4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa arsitektur candi pada masa Hindu-Buddha di Jawa bukan sekadar bangunan religius, melainkan instrumen politik yang sarat dengan makna ideologis. Candi berfungsi sebagai media representasi kekuasaan, sarana legitimasi raja, dan simbol hubungan antara kekuasaan duniawi dengan kekuasaan ilahi.

Pertama, struktur dan tata ruang candi menunjukkan adanya konsep kosmologis yang menempatkan raja sebagai pusat tatanan dunia (*axis mundi*). Hal ini tampak pada Borobudur dengan konsep mandalanya, maupun Prambanan dengan dominasi candi Siwa sebagai simbol supremasi dinasti Sanjaya.

Kedua, tradisi deifikasi raja pada masa Singhasari memperlihatkan bagaimana raja diposisikan sebagai dewa setelah wafat. Dengan demikian, kekuasaan politik diperkuat oleh legitimasi spiritual sehingga rakyat memandang raja bukan sekadar pemimpin duniawi, tetapi juga figur transendental.

Ketiga, pada masa Majapahit, candi tidak hanya berfungsi religius, tetapi juga sebagai candi negara, sebagaimana terlihat pada Candi Penataran. Relief kisah Mahabharata dan Ramayana digunakan sebagai sarana propaganda moral yang menegaskan raja sebagai penegak dharma.

Keempat, secara umum candi berperan sebagai media komunikasi visual yang efektif bagi masyarakat Jawa kuno, di mana pesan politik disampaikan melalui simbol arsitektural, relief, dan ikonografi. Dalam konteks ini, candi dapat dipandang sebagai “teks politik” yang tertulis dalam batu, yang menyampaikan pesan kekuasaan kepada rakyat maupun generasi penerus.

Akhirnya, studi ini menunjukkan bahwa hubungan antara agama, budaya, dan politik pada masa Jawa klasik sangat erat dan saling menguatkan. Arsitektur candi menjadi bukti konkret bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya ditegakkan melalui kekuatan militer atau hukum, tetapi juga melalui simbolisme sakral yang mampu bertahan lintas zaman. Dengan demikian, candi tidak hanya berfungsi sebagai warisan arsitektur dan religius, tetapi juga sebagai dokumen sejarah politik yang penting untuk dipahami dalam kajian sejarah Indonesia.

## References

- Andriyanto. Konsep Kedudukan Rajapada Awal Berdirinya Kerajaan Mataram Islam. *Keraton: Journal of History Education and Culture*. Vol. 4., No. 1, June 2022, halaman 30-37.
- Geertz, C. (1980). *Negara Teater: Politik Kebudayaan di Bali*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Holt, C. (1967). *Art in Indonesia: Continuities and Change*. Ithaca: Cornell University Press.
- Munandar, A. A. (2001). *Candi, Fungsi dan Pengertiannya*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Poespoprodjo, W. (1986). *Filsafat Politik: Kajian Tentang Kekuasaan dan Negara*. Bandung: Remadja Karya.
- Rahardjo, S. (2002). *Peradaban Jawa: Dari Mataram Kuno sampai Majapahit Awal*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Sedyawati, E. (1994). *Arca-arca Perwujudan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Slamet Muljana. (1979). *Negarakertagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Bhartara Karya Aksara.
- Soekmono, R. (1973). *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia (Jilid 2)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Stutterheim, W. F. (1956). *Studies in Indonesian Archaeology*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Zoetmulder, P. J. (1985). *Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*. Jakarta: Djambatan.